

**KEDUDUKAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
DALAM SISTEM OTONOMI DAERAH DI
PROPINSI SUMATERA UTARA**



SKRIPSI

**OLEH
HAMZAH**

NPM : 98 850 0036

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

M E D A N

2 0 0 4

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **KEDUDUKAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
DALAM SISTEM OTONOMI DAERAH DI
PROPINSI SUMATERA UTARA**

Nama Mahasiswi : HAMZAH

No. Stambuk : 98.850.0036

Program Studi : Ilmu Pemerintahan



Menyetujui :
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

(Drs. H.M. Yusuf Harahap.)

Pembimbing II

(Taufik Siregar, SH, M.Hum.)

Mengetahui :

Ketua Jurusan

(Drs. H.M. Yusuf Harahap.)



Dekan

Usman Tarigan, MS.)



KATA PENGANTAR

Pada kesempatan yang pertama ini penulis mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, karena atas berkah dan rahmad-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas yang diwajibkan kepada Mahasiswa Universitas Medan Area pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan untuk memperoleh gelar kesarjanaan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan seperti keterbatasan waktu, kurangnya literatur yang diperlukan, keterbatasan kemampuan menulis sendiri dan sebagainya, namun demikian dengan kemauan keras yang didorong oleh rasa tanggung-jawab dan dilandasi itikad baik, akhirnya kesulitan tersebut dapat diatasi.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah ***“Kedudukan Badan Kepegawaian Daerah Dalam Sistem Otonomi Daerah di Propinsi Sumatera Utara”***.

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak telah penulis buat sibuk maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih kepada pihak-pihak tersebut, terutama kepada :

- Bapak Drs. Usman Tarigan, MS, selaku Dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area .
- Bapak Drs. H.M. Yusuf Harahap, selaku Dosen Pembimbing I penulis,

- Bapak Taufik Siregar, SH, M.Hum, sebagai Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Sumatera Utara beserta seluruh unsur stafnya dimana penulis mengadakan penelitian.
- Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta semua unsur staf administrasi Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua penulis, bagi keduanya bakti dan doa penulis. Juga kepada isteri penulis yang telah memberikan dorongan tersendiri kepada penulis sehingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Demikianlah dahulu penulis sampaikan, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Januari 2004

Penulis

H A M Z A H
NPM : 98 850 0036

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Pembatasan Masalah	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Pemikiran	7
F. Hipotesis	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Pengertian Manajemen sumber Daya Manusia dan Fungsi- Fungsi Operasionalnya	10
B. Pengertian Administrasi Kepegawaian	13
C. Pengertian Otonomi Daerah	15
D. Sistem Otonomi Daerah	19
E. Hubungan Antara Tingkat-Tingkat Dalam Pemerintahan ...	23
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	29
A. Populasi dan Sampel	29
B. Metode Pengumpulan Data	30
C. Variabel dan Definisi Operasional	31

D. Metode Analisis Data	33
BAB IV. DESKRIPTIF LOKASI PENELITIAN	34
A. Sejarah Singkat Berdirinya Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Sumatera Utara	34
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah	37
C. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas	38
BAB V. ANALISIS DAN EVALUASI	50
A. Analisis Terhadap Kedudukan Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Sumatera Utara	50
B. Tata Laksana Koordinasi Kepegawaian Dalam Sistem Otonomi Daerah	52
C. Sistem Pemberdayaan Pegawai Negeri Sipil Yang Dijalankan	53
D. Kegiatan-kegiatan Dalam Rangka Pemeberdayaan Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah . ..	55
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran-Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar belakang Masalah

Peranan Pegawai Negeri sebagai unsur Aparatur Negara dan Abdi Negara adalah sangat penting dan menentukan di dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai tujuan nasional seperti tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melakukan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam rangka untuk mencapai Tujuan Nasional sebagai tersebut di atas diperlukan adanya Pegawai Negeri yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna, berhasil guna, berkedaulatan tinggi dan sadar tanggung jawab sebagai Aparat Negara dan juga Abdi Masyarakat, kiranya perlu dibina sebaik-baiknya atas dasar sistem prestasi kerja yang dibuktikan dengan nyata.

Oleh karena itu untuk mencapai kesempurnaan Aparatur yang dicita-citakan itu pada dasarnya diperoleh dari pada orang-orang atau pegawai yang bermental tinggi dan baik. Setiap manusia akan menghasilkan prestasi kerja yang lebih baik dan juga mempunyai semangat dalam menunaikan tugasnya demi tercapainya tujuan yang dikehendaki.

Sehubungan dengan itu, maka kepada setiap Pegawai Negeri perlu dilakukan pengawasan terhadap aktivitas dan perilakunya dalam melakukan penyelenggaraan tugas Pemerintahan dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pegawai Negeri merupakan unsur yang paling penting dalam suatu instansi Pemerintahan, karena pegawai inilah yang menggerakkan segala sumber daya yang ada di Pemerintahan serta yang akan mengendalikannya. Oleh karena itu Pemerintah harus memberikan perhatian yang serius terhadap para pegawai sebagaimana dengan sumber daya lainnya.

Dalam melaksanakan fungsinya, seorang atasan tidak bekerja sendirian, tetapi meminta bantuan orang lain untuk menjalankannya. Dengan demikian seorang atasan harus mampu mempengaruhi seluruh pegawai agar mau bekerja sesuai apa yang diharapkan oleh Pemerintah. Untuk itu atasan perlu mengadakan suatu sistem pengawasan kepada pegawai, sehingga mereka bekerja sebaik mungkin dan dapat meningkatkan produktivitas kerja mereka.

Di satu sisi memasuki awal dekade tahun 2001 tepatnya tanggal 7 Mei 2001 maka di Indonesia mulai diberlakukan secara efektif Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah sebagai suatu bahan dasar terselenggaranya pelaksanaan otonomi di daerah.

Kepentingan tentang pelaksanaan otonomi daerah tidak saja melingkupi kepentingan atas tata cara pengelolaan pemerintahan pada suatu daerah, tetapi juga hal yang penting lainnya adalah kebebasan daerah untuk berdiri sendiri atas kemampuan daerahnya masing-masing, dengan pertimbangan pembagian pendapatan

DAFTAR PUSTAKA

- B.H. Erickson dan T.A. Nosamchuk, *Memahami Data Statistik Untuk Ilmu Sosial*, LP3ES, Jakarta, 1991.
- I.G. wursanto, *Manajemen Kepegawaian*, Kanisius, Yogyakarta, 1992.
- Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994.
- Krishna D. Darumurti dan Umbu Rauta, *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Malayu S.P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. CV. Haji Masagung, Jakarta, 1993.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Musanef, *Management Kepegawaian di Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1998.
- Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Jakarta, 1997.
- S.L.S. Danuredjo, *Otonomi di Indonesia Ditinjau Dalam Rangka Kedaulatan*, Jakarta, 1997.
- Saleh Syariff, *Otonomi dan Daerah Otonom*, Endang, Jakarta, 1993.
- Sudjana, *Statistika*, Tarsito, Bandung, 1996.
- Suhardi, *Politik Sosial Modern, Dasar dan Directive*, Yayasan Karya Dharma IIP, Jakarta, 1993.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1997.
- The Liang Gie, *Administrasi Perkantoran*, Nur Cahaya, Yogyakarta, 1991.
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 1992.
- Y.W. Sunindhia, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah*, Erlangga, Jakarta, 1997.